I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum selalu berhubungan dengan manusia. Sejak dalam kandungan pun manusia dapat berperan sebagai subjek hukum, yaitu sebagai pemegang hak dan kewajiban hukum. Dalam sistem hukum dikenal dengan asas *fictie* hukum yaitu dimana semua orang dianggap telah mengetahui Undang-Undang sebagai salah satu sumber hukum.

Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu Negara apapun sistem yang digunakan Negara tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.¹

Suatu Negara hukum (*rechtsstaat*) terdapat unsur-unsur perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia, salah satunya yaitu perlindungan hukum terhadap anak.² Dalam perkembangannya upaya memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbaharui dengan

¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT, Elex Media Komputindo, 2000, hlm.192.

² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia (Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia)*, hlm.2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. selain itu terdapat pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemberlakuan beberapa Undang-Undang tersebut merupakan upaya penyempurnaan perlindungan terhadap hak-hak anak yang telah lama diupayakan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Sesuai dengan aturan diatas, dapat diidentifikasi bahwa dalam hal menanggapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tidak pidana, maka hak yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-ciri yang khusus, Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.³

Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

Pengertian anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas), tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung. 2009. Hlm.43

Anak merupakan tumpuan harapan masa depan Bangsa, Negara, Masyarakat, ataupun Keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya.⁴

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan Bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.⁵ Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.

Dalam konvensi hak anak terdapat 4 (empat) prinsip umum yang menjadi dasar dan acuan bagi para pihak khususnya negara saat melakukan kewajibannya memenuhi, menghormati, dan melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip non-diskriminasi, prinsip ini mewajibkan negara agar semua anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sama.
2. Prinsip kepentingan terbaik anak, prinsip kepentingan terbaik secara sistematis dengan mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan anak akan dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan badan-badan tersebut.
3. Prinsip atas keberlangsungan hidup dan perkembangannya.
4. Prinsip penghargaan terhadap anak.

⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Selanjutnya disebut dengan Darwan Prinst I), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 98

⁵ Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Serial Online September 16, 2009, available from : URL: <http://Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com>, hal.1

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia memberikan perhatian secara khusus terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Hal ini dipertegas dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pertimbangan pemberlakuan Undang-Undang ini adalah anak dipandang bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang. Untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Kesenjangan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diantaranya adalah pelaksanaan yang belum maksimal, karena kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Masih terdapat perlakuan yang sama seperti orang dewasa terhadap anak yang melakukan tindak pidana, baik dalam proses

penyidikan maupun penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan semangat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salah satu contoh kasus anak yang melakukan tindak pidana dan membutuhkan Bantuan Hukum di Bandar Lampung adalah AS (Terdakwa), di dakwa atas tindak kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-Undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang diatur dalam Pasal 214 jo. Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berlokasi di jalan Hi. Agus Salim Gg. Mangga Dua Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.

Saat kejadian, AS sedang berada di lantai II rumahnya bersama dengan Bayu (temannya). Kejadian tindak kekerasan melawan seorang pejabat (polisi) tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 09.00 wib. Hal ini diawali dari penangkapan yang dilakukan Anggota Polisi terhadap warga yang diduga sebagai bandar narkoba, dengan melihat kedatangan polisi tersebut memicu AS (terdakwa) 17 Tahun melakukan tindakan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap Anggota Polresta Bandar Lampung yang hendak menangkap tersangka narkoba di Kaliawi. Kemudian AS ditahan pada tanggal 29 Mei 2014 oleh Kepolisian Polresta Bandar Lampung. Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang kesemuanya adalah polisi.

Tindakan pengancaman yang dilakukan AS terhadap Anggota Polri membuatnya ditangkap. Ketua Majelis Hakim Ahmad Virzha menyatakan bahwa AS bersalah

melanggar Pasal 214 Ayat 1 KUHP “Terdakwa dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Dia dinilai telah melanggar Pasal 214 Ayat 1 KUHP”⁶

Peranan LBH terhadap pelaku pengancaman yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 701/Pid.B/2014/PN.Tjk. Didasarkan pada aturan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, lembaga bantuan hukum Bandar Lampung adalah lembaga yang menfokuskan diri menangani *issue* Penegakan demokrasi dan promosi Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan aktivitasnya lembaga bantuan hukum Bandar Lampung tidak dipisahkan dari dinamika usaha-usaha advokasi hak asasi manusia dan perjuangan demokrasi. Usaha-usaha advokasi hak asasi manusia dan perjuangan demokrasi yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum Bandar Lampung ternyata mampu membangun dan mengembangkan advokasinya ke arah yang lebih strategis bagi proses upaya untuk mewujudkan tatanan sosial yang lebih adil dengan Pola Pemberian Bantuan Hukum Struktural (BHS).

Bantuan hukum struktural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan politik maupun ekonomi.

Pilihan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung untuk lebih memfokuskan diri pada usaha-usaha dalam pembelaan kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu, lembaga bantuan hukum Bandar Lampung untuk mendorong

⁶ Putusan Pengadilan Negri Tanjung Karang Nomor: 701/Pid.B/2014/PN.Tjk

munculnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak asasi manusia dan demokrasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Harus dipahami bahwa, bantuan hukum merupakan Hak konstitusional, Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 juga menyebutkan tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

“Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya disebutkan pula dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa : “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

Pemberian bantuan hukum tersebut dapat diberikan kepada semua orang tanpa membedakan status sosial seseorang. Hal tersebut adalah sebagaimana yang ada pada negara hukum dimana negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang.

Secara Konseptual hak untuk mendapat bantuan hukum ini meliputi hak-hak sebagai berikut :

1. Hak untuk membela diri secara pribadi atau untuk dibantu oleh penasehat hukum menurut pilihannya sendiri
2. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam hak tidak mampu hukum
3. Hak untuk berkomunikasi dengan penasehat hukum
4. Hak untuk diberitahu mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum.⁷

Setiap proses pemeriksaan, anak harus mendapat bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan Hak Konstitusional dan hak asasi setiap anak yang berhadapan dengan hukum yang harus dipenuhi oleh Negara. Bantuan hukum harus dipenuhi secara tepat dan benar, karena akan sangat berpengaruh pada proses pembuktian serta vonis Hakim. Dalam berbagai ketentuan hukum dan juga *konveksi* hak-hak anak dinyatakan secara tegas bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus memperoleh Bantuan Hukum.⁸

Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi penting terlihat dari kewajiban yang dibebankan pada aparat penegak hukum untuk memberitahukan hak ini kepada anak dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak ini. Hak ini harus dipenuhi pada setiap tingkat pemeriksaan tanpa terkecuali. Untuk memenuhi hak ini, komite hak-hak anak PBB pun

⁷ Baut Paul S, *Remang-remang Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta: 1998, hlm.34

⁸ Lihat Pasal 18 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 51 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak*, dan Pasal 17 Ayat (2) huruf e Peraturan Kapolri No.3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

merekomendasikan Negara untuk menyediakan sebanyak mungkin Pengacara atau Paralegal yang ahli dan terlatih untuk memberikan bantuan hukum terhadap anak.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dalam memperjuangkan kepentingan hukum terhadap perkara anak di bawah umur (Studi Putusan PN No :701/Pid.B/2014/PN.Tjk)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul berkaitan dengan peranan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dalam memperjuangkan kepentingan hukum terhadap perkara anak di bawah umur (Studi Putusan No: 701/Pid.B/2014/PN.Tjk)

Permasalahan-permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimanakah peranan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dalam memperjuangkan kepentingan hukum dalam proses persidangan anak?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat peranan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dalam memperjuangkan kepentingan hukum dalam proses persidangan anak?

⁹ Lihat Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup terkait substansi hukumnya dalam kajian ilmu hukum pidana., dengan obyek penelitian terkait Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dalam memperjuangkan kepentingan hukum dalam proses persidangan anak (Studi Putusan No: 701/Pid.B/2014/PN.Tjk)., tempat penelitian menurut wilayah hukum Bandar Lampung berdasarkan kepada data penelitian rentan waktu 2014-2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Perananan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dalam memperjuangkan Kepentingan hukum dalam perkara anak di bawah umur.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui peranan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dalam memperjuangkan kepentingan hukum dalam proses persidangan anak.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat peranan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dalam memperjuangkan kepentingan hukum dalam proses persidangan anak.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, yaitu berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan dibidang ilmu hukum pidana mengenai peranan

Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dalam memperjuangkan kepentingan hukum dalam proses persidangan anak

b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan pengetahuan bagi penulis dan bahan tambahan perpustakaan atau bahan informasi bagi Hakim, JPU, Advokat, dan Masyarakat yang memerlukan mengenai peranan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dalam memperjuangkan kepentingan hukum dalam proses persidangan anak di masa yang akan datang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.¹⁰

Kerangka Teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹¹

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Peranan

Peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1989, hlm.125.

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.

rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹²

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹³

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

¹² *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta: 2002. Hlm. 348.

¹³ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Press. Jakarta: Rajawali, 2002.hlm.242

3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁴

Jenis-jenis peranan sebagai berikut:

1. Peranan Normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan Ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peranan Faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁵

b. Teori Bantuan Hukum

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Menurut John Rawls, perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan itulah yang disebut dengan keadilan.¹⁶

John Rawls menyatakan kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan, selanjutnya jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal:

¹⁴ *Ibid.* hlm.242

¹⁵ *Ibid.* hlm.243

¹⁶ Darji Darmodiharjo dan Sidartha, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 161

1. Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktik-praktik institusional.
2. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

Teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum

1. Setiap Peraturan Hukum memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peranan (*Role Occupant*) itu diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seseorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksi, aktivitas dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan politik, sosial, dan lain lainnya mengenai dirinya.
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan politik, sosial, dan lain-lain mengenai diri mereka serta umpan balik datang dari pemegang peranan.
4. Bagaimana peranan pembuat Undang-Undang itu akan bertindak merupakan fungsi Peraturan-Peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, politik, ideologis, dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.¹⁷

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian hukum, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm.4

c. Teori Faktor-Faktor Penghambat Pemberian Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum tidak terlepas dari kendala dan hambatan. Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dimana masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.¹⁸

d. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

Menurut Barda Nawawi Arief, Perlindungan Hukum terhadap Anak adalah upaya Perlindungan Hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. Hlm.8-10

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998) hlm.156

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.²⁰

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.²¹

Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peranan adalah suatu sistem atau kaidah-kaidah yang berisikan potokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan yang dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperanannya pemegang perananan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.²²
- b. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.²³ Mendampingi baik di persidangan maupun diluar persidangan.
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan-gangguan terhadap tertib

²⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004. hlm.18

²¹ Soerjono Soekanto. *Op Cit.* hlm.103

²² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003. hlm. 193

²³ YLBHI, *Bantuan Hukum Bukan Hak yang Diberi*, Jakarta: YLBHI, 2013, hlm. 112

hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan terhadap seorang pelaku.²⁴

d. Anak

Anak menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

e. Perlindungan Anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.²⁵

f. Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Dengan demikian apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum.²⁶

²⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm.46

²⁵ Arif Gosita, *Masalah korban kejahatan*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu populer, 2004. hlm.18

²⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. Hlm. 5

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memperjelas serta mempermudah dan penulisan skripsi ini maka dibuat suatu sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi, kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai pengertian peranan dan bantuan hukum, sejarah lembaga bantuan hukum banddar lampung, pengertian anak, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, dan sistem peradilan pidana anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu langkah-langkah digunakan oleh penulis dalam melakukan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pokok-pokok bahasan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan

yaitu tentang Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dalam memperjuangkan kepentingan hukum terhadap perkara anak dibawah umur (Studi Putusan PN No:701/Pid.B/2014/PN.Tjk) serta faktor penghambat Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dalam memperjuangkan kepentingan hukum dalam proses persidangan anak (Studi Putusan No.701/ PIDB/2014/ PN.TJK).

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan secara ringkas dari hasil penelitian dan pembahasan, serta memuat saran penulisan sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.